



Konstruksi Adaptasi Implementasi MBKM dalam Perspektif Kapasitas Kelembagaan dan Asimetri Akses Pendidikan Tinggi Regional

Rifai*, Mukhlis Ishaka, Abdul Kadir, Haeril

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Mbojo Bima, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received July 20, 2026

Revised August 03, 2026

Accepted August 05, 2026

Available online August 05, 2023

Kata Kunci :

Adaptasi Lokal, Kapasitas Kelembagaan, Ketimpangan Akses Pendidikan, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Pendidikan Tinggi Regional

Keywords:

Local Adaptation, Institutional Capacity, Educational Access Inequality, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Regional Higher Education.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2026 by Author. Published by CV. Rifainstitut

ABSTRAK

Implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di perguruan tinggi daerah perifer menghadapi kesenjangan antara desain kebijakan nasional dan kapasitas kelembagaan lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika implementasi kebijakan tersebut di perguruan tinggi Kota Bima dengan menelaah kapasitas institusi, strategi adaptasi lokal, ketimpangan akses mahasiswa, dan mekanisme evaluasinya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur, observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pimpinan perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa, serta analisis dokumen kurikulum, laporan kegiatan, dan dokumen kerja sama. Data dianalisis melalui pengkodean, kategorisasi, dan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antusiasme institusi terhadap kebijakan nasional belum diimbangi oleh kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur digital, jaringan kemitraan, dan dukungan finansial mahasiswa. Kondisi tersebut mendorong perguruan tinggi mengadaptasi program melalui kegiatan berbasis komunitas, desa, dan pemerintah daerah. Namun, adaptasi ini belum sepenuhnya mengatasi ketimpangan akses dan kecenderungan evaluasi yang masih berorientasi administratif. Penelitian menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan di daerah perifer bersifat kontekstual, adaptif, dan tidak linear. Keberhasilannya memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, dukungan afirmatif bagi mahasiswa, pengembangan kemitraan lokal, dan evaluasi berbasis capaian pembelajaran.

ABSTRACT

The implementation of the Merdeka Belajar Kampus Merdeka policy in peripheral higher education institutions reveals a gap between national policy design and local institutional capacity. This study aims to analyze the dynamics of policy implementation in higher education institutions in Bima City by examining institutional capacity, local adaptation strategies, unequal student access, and evaluation mechanisms. A descriptive qualitative approach was employed. Data were collected through a literature review, field observations, in-depth interviews with higher education leaders, lecturers, and students, and an analysis of curricula, program reports, and partnership documents. The data were analyzed through coding, categorization, and thematic analysis. The findings show that institutional enthusiasm for the national policy has not been matched by adequate human resources, digital infrastructure, partnership networks, and financial support for students. These limitations have encouraged institutions to adapt the program through community-based, village-based, and local government initiatives. However, such adaptations have not fully addressed unequal access or the dominance of administrative evaluation. The study concludes that policy implementation in peripheral regions is contextual, adaptive, and non-linear. Its effectiveness requires stronger institutional capacity, affirmative support for students, expanded local partnerships, and evaluation focused on learning outcomes.

*Corresponding author

E-mail addresses: Stisiprifai@gmail.com (Rifai)

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad ke-21 telah menggeser secara fundamental struktur ekonomi, pola produksi, serta konfigurasi pasar tenaga kerja global, sehingga memunculkan tuntutan baru terhadap sistem pendidikan tinggi sebagai produsen utama sumber daya manusia berpengetahuan (Al Anshori & Syam, 2021). Transformasi ini tidak hanya berkaitan dengan perubahan jenis pekerjaan, tetapi juga perubahan karakter pekerjaan itu sendiri yang semakin berbasis pengetahuan, kreativitas, kolaborasi, dan kemampuan adaptif terhadap perubahan teknologi yang berlangsung sangat cepat (Widawati & Anwar, 2023). Dalam konteks ini, pendidikan tinggi tidak lagi dapat beroperasi dengan paradigma lama yang menempatkan mahasiswa sebagai penerima pengetahuan pasif, melainkan harus bertransformasi menjadi ekosistem pembelajaran dinamis yang memungkinkan mahasiswa memperoleh pengalaman belajar lintas disiplin, lintas sektor, dan lintas ruang sosial (Arisandi et al., 2022).

Perubahan lanskap dunia kerja yang semakin fleksibel dan tidak terstruktur secara linear menuntut lulusan perguruan tinggi memiliki kompetensi yang tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga kompetensi transversal seperti kemampuan pemecahan masalah kompleks, komunikasi interpersonal, manajemen diri, literasi digital, serta kemampuan bekerja dalam lingkungan multidisiplin (Mailin, 2021). Kondisi ini menciptakan tekanan institusional terhadap perguruan tinggi untuk merombak sistem kurikulum, metode pembelajaran, sistem evaluasi, serta pola kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (Ulum et al., 2023). Perguruan tinggi dituntut tidak hanya menghasilkan lulusan dengan indeks prestasi akademik tinggi, tetapi juga lulusan yang memiliki pengalaman praktis, kemampuan adaptif, dan kesiapan kerja yang tinggi (Aswita, 2022).

Dalam konteks Indonesia, tuntutan transformasi pendidikan tinggi tersebut direspons oleh pemerintah melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), yang secara konseptual dirancang sebagai kerangka kebijakan pendidikan tinggi yang fleksibel, adaptif, dan berbasis pengalaman belajar nyata (Muh. Hasan Marwiji et al., 2023). Kebijakan ini merepresentasikan perubahan paradigma dari education supply oriented menuju education demand oriented, di mana sistem pendidikan tidak lagi hanya berorientasi pada penyediaan program studi, tetapi pada kebutuhan kompetensi masa depan dan dinamika pasar kerja (Fuadi & Irdalisa, 2022). Dengan demikian, MBKM bukan sekadar kebijakan kurikulum, melainkan transformasi sistem pendidikan tinggi secara struktural dan kultural.

Secara konseptual, MBKM memberikan hak kepada mahasiswa untuk menempuh pembelajaran di luar program studi selama tiga semester melalui berbagai skema seperti magang industri, proyek kemanusiaan, penelitian, wirausaha, asistensi mengajar, pertukaran pelajar, dan proyek independen (Arsyad & Widuhung, 2022). Kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkaya pengalaman belajar mahasiswa melalui pembelajaran berbasis pengalaman nyata (experiential learning), sehingga mahasiswa tidak hanya memahami teori tetapi juga memahami konteks penerapan ilmu dalam kehidupan nyata (Fuadi, 2022). Dalam perspektif pendidikan modern, pendekatan ini dianggap lebih efektif dalam membentuk kompetensi abad ke-21 dibandingkan pembelajaran konvensional berbasis kelas (Suteja, 2020).

Namun demikian, implementasi kebijakan pendidikan berskala nasional tidak selalu berjalan secara linear dan seragam di seluruh wilayah, karena setiap daerah memiliki kapasitas institusional, sumber daya, jaringan kemitraan, dan karakteristik sosial ekonomi yang berbeda (Simatupang & Yuhertiana, 2021). Dalam studi kebijakan publik, fenomena ini sering disebut sebagai implementation gap, yaitu kesenjangan antara desain kebijakan di tingkat pusat dengan realitas implementasi di tingkat lokal. Kesenjangan ini seringkali muncul karena kebijakan dirancang dengan asumsi kapasitas institusi yang relatif seragam,

padahal pada kenyataannya terdapat disparitas besar antara perguruan tinggi di kota besar dan perguruan tinggi di daerah periferal (Mutmainah et al., 2022).

Kota Bima sebagai salah satu wilayah periferal dalam sistem pendidikan tinggi nasional memiliki karakteristik kelembagaan pendidikan tinggi yang berbeda dibandingkan dengan kota-kota besar di Indonesia (Rodiyah, 2021). Sebagian besar perguruan tinggi di Kota Bima merupakan perguruan tinggi swasta dengan kapasitas pendanaan terbatas, jaringan kemitraan industri yang masih minim, serta infrastruktur digital yang belum sepenuhnya memadai. Kondisi ini secara tidak langsung mempengaruhi kemampuan institusi dalam mengimplementasikan program-program MBKM secara optimal, terutama program yang membutuhkan mobilitas mahasiswa, kerja sama industri, serta dukungan finansial yang cukup besar (Purwanti, 2021).

Selain keterbatasan institusional, faktor sumber daya manusia juga menjadi salah satu tantangan penting dalam implementasi MBKM (Jufriadi et al., 2022). Dosen sebagai aktor utama dalam pelaksanaan kurikulum memiliki peran strategis dalam merancang pembelajaran, membimbing mahasiswa, serta menjalin kerja sama dengan mitra eksternal. Namun, perubahan kurikulum yang cepat seringkali tidak diikuti dengan pelatihan dan peningkatan kapasitas dosen yang memadai, sehingga banyak dosen mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan program MBKM ke dalam kurikulum program studi. Akibatnya, implementasi MBKM seringkali bersifat administratif dan formalistik tanpa diikuti transformasi pembelajaran yang substantif (Mudrikah et al., 2022).

Di sisi lain, mahasiswa sebagai subjek utama kebijakan MBKM juga menghadapi berbagai keterbatasan dalam mengakses program-program MBKM, terutama yang berada di luar daerah atau di perusahaan besar. Program magang, pertukaran pelajar, atau proyek independen seringkali membutuhkan biaya transportasi, akomodasi, dan biaya hidup yang tidak sedikit, sehingga mahasiswa dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas cenderung tidak dapat mengikuti program tersebut (Yanuarsari et al., 2022). Kondisi ini berpotensi menciptakan ketimpangan akses terhadap program MBKM, di mana mahasiswa dengan modal ekonomi lebih besar memiliki kesempatan lebih luas dibandingkan mahasiswa dengan keterbatasan ekonomi (Fachri et al., 2024).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh struktur sosial ekonomi mahasiswa, kapasitas institusi, serta jaringan kemitraan yang dimiliki perguruan tinggi (Mariati, 2021). Dalam perspektif sosiologi pendidikan, kondisi ini dapat menciptakan reproduksi ketimpangan pendidikan (*educational inequality*), di mana kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan justru berpotensi memperlebar kesenjangan antara kelompok mahasiswa yang memiliki akses sumber daya dan yang tidak memiliki akses tersebut (Dewi et al., 2022).

Selain persoalan akses mahasiswa, tantangan lain dalam implementasi MBKM adalah keterbatasan kemitraan antara perguruan tinggi dan dunia usaha serta dunia industri (Suandi, 2018); (Arisandi et al., 2022). Program magang dan proyek industri sebagai salah satu inti MBKM membutuhkan jaringan kemitraan yang luas dan berkelanjutan. Namun, di daerah seperti Kota Bima yang struktur ekonominya masih didominasi oleh sektor informal, pertanian, dan perdagangan kecil, jumlah industri besar yang dapat menjadi mitra MBKM sangat terbatas. Akibatnya, banyak perguruan tinggi harus berimprovisasi dengan mengembangkan program berbasis komunitas, pemerintah daerah, atau organisasi masyarakat sebagai alternatif program MBKM (Baharuddin, 2021).

Adaptasi lokal tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pada tingkat lokal tidak selalu mengikuti desain kebijakan secara kaku, melainkan mengalami proses reinterpretasi sesuai dengan kondisi lokal. Dalam teori implementasi kebijakan, fenomena ini sering dijelaskan melalui perspektif *street-level bureaucracy*, di mana aktor pelaksana kebijakan di tingkat bawah memiliki diskresi dalam menafsirkan dan melaksanakan kebijakan

sesuai dengan kondisi lapangan. Dengan demikian, implementasi MBKM di daerah tidak dapat dipahami hanya sebagai proses administratif, tetapi sebagai proses sosial yang melibatkan negosiasi, adaptasi, dan improvisasi institusi pendidikan tinggi (Santri Fahmi, 2022); (Al Anshori & Syam, 2021).

Permasalahan lain yang juga muncul dalam implementasi MBKM adalah belum adanya sistem evaluasi yang komprehensif untuk mengukur dampak program MBKM terhadap kualitas pembelajaran, kompetensi mahasiswa, dan prestasi akademik (Krishnapatria, 2021); (Widawati & Anwar, 2023). Sebagian besar perguruan tinggi masih menilai keberhasilan MBKM berdasarkan jumlah mahasiswa yang mengikuti program, jumlah kerja sama yang dilakukan, atau jumlah laporan kegiatan, bukan berdasarkan peningkatan kompetensi mahasiswa atau dampak jangka panjang terhadap kesiapan kerja lulusan (Donny Sopiansyah, 2020); (Mailin, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi MBKM masih lebih berorientasi pada pemenuhan indikator administratif dibandingkan transformasi pembelajaran yang substantif.

Dalam konteks tersebut, penting untuk memahami bahwa implementasi kebijakan pendidikan tinggi tidak dapat dinilai hanya dari perspektif kepatuhan terhadap regulasi, tetapi harus dilihat dari bagaimana kebijakan tersebut diadaptasi, diterjemahkan, dan diimplementasikan dalam konteks lokal yang memiliki keterbatasan sumber daya dan struktur sosial ekonomi yang berbeda (Dewi et al., 2022). Oleh karena itu, studi tentang implementasi MBKM di daerah periferal menjadi penting untuk memahami dinamika kebijakan pendidikan tinggi secara lebih komprehensif dan kontekstual (Baharuddin, 2021).

Penelitian tentang MBKM selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan peningkatan jumlah publikasi yang cukup signifikan, yang menandakan bahwa kebijakan ini menjadi salah satu topik utama dalam penelitian pendidikan tinggi di Indonesia. Sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada kesiapan mahasiswa, persepsi dosen, evaluasi kurikulum, integrasi teknologi pembelajaran, serta dampak MBKM terhadap pembelajaran berbasis proyek dan literasi digital. Namun, sebagian besar penelitian tersebut dilakukan di perguruan tinggi besar atau di wilayah perkotaan yang memiliki sumber daya dan jaringan kemitraan yang relatif lebih baik.

Keterbatasan penelitian yang berfokus pada perguruan tinggi di daerah periferal menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan dalam literatur akademik tentang implementasi MBKM. Padahal, perguruan tinggi di daerah memiliki tantangan implementasi yang berbeda dibandingkan perguruan tinggi di kota besar, seperti keterbatasan industri mitra, keterbatasan pendanaan, keterbatasan infrastruktur digital, serta keterbatasan mobilitas mahasiswa (Santri Fahmi, 2022). Oleh karena itu, penelitian yang berfokus pada implementasi MBKM di daerah seperti Kota Bima menjadi penting untuk mengisi kesenjangan penelitian yang belum banyak dieksplorasi (Krishnapatria, 2021).

Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur persepsi atau tingkat kepuasan mahasiswa terhadap program MBKM, sementara penelitian yang menggali dinamika implementasi kebijakan dari perspektif institusi, dosen, dan mahasiswa secara mendalam masih relatif terbatas. Padahal, implementasi kebijakan pendidikan merupakan fenomena kompleks yang tidak dapat sepenuhnya dipahami melalui angka dan statistik, tetapi membutuhkan pendekatan kualitatif untuk memahami proses, dinamika, dan interaksi antar aktor dalam implementasi kebijakan.

Penelitian ini menjadi penting karena berupaya memahami implementasi MBKM bukan hanya sebagai program pendidikan, tetapi sebagai fenomena kebijakan publik yang melibatkan interaksi antara pemerintah, perguruan tinggi, dosen, mahasiswa, dan mitra eksternal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat MBKM dari perspektif kurikulum atau pembelajaran, tetapi dari perspektif implementasi kebijakan, kapasitas institusi, adaptasi lokal, dan ketimpangan akses pendidikan.

Dalam konteks pendidikan tinggi di daerah, implementasi kebijakan nasional seringkali menghadapi dilema antara kepatuhan terhadap regulasi pusat dan keterbatasan kapasitas lokal. Perguruan tinggi di daerah harus tetap melaksanakan kebijakan MBKM sesuai regulasi nasional, namun di sisi lain harus menyesuaikan dengan kondisi sumber daya yang terbatas. Kondisi ini seringkali memunculkan berbagai bentuk adaptasi lokal yang tidak secara eksplisit diatur dalam kebijakan nasional, tetapi menjadi solusi praktis dalam implementasi kebijakan di tingkat lokal.

Adaptasi lokal tersebut dapat berupa pengembangan program MBKM berbasis pemberdayaan desa, proyek pengabdian masyarakat, kerja sama dengan pemerintah daerah, atau program kewirausahaan lokal. Program-program tersebut mungkin tidak sepenuhnya sama dengan desain MBKM di perguruan tinggi besar, tetapi tetap memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan pengalaman belajar nyata kepada mahasiswa. Fenomena ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan tinggi bersifat kontekstual dan tidak dapat diseragamkan secara nasional.

Dengan demikian, studi tentang implementasi MBKM di Kota Bima tidak hanya penting untuk memahami bagaimana kebijakan dilaksanakan di daerah, tetapi juga penting untuk memahami bagaimana kebijakan nasional diterjemahkan dalam konteks lokal yang memiliki keterbatasan sumber daya dan struktur ekonomi yang berbeda. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori implementasi kebijakan pendidikan tinggi di daerah perifer, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap kondisi daerah.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pendekatan yang tidak hanya melihat implementasi MBKM dari perspektif evaluasi program atau persepsi mahasiswa, tetapi menganalisis MBKM sebagai proses negosiasi kebijakan antara struktur kebijakan nasional dan kapasitas institusi lokal, dengan menekankan pada konsep adaptasi lokal, resistensi kelembagaan, ketimpangan akses mahasiswa, serta improvisasi institusi dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan nasional di wilayah perifer yang memiliki keterbatasan sumber daya dan jaringan kemitraan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dinamika implementasi kebijakan MBKM pada perguruan tinggi di Kota Bima dalam konteks sosial, kelembagaan, dan kebijakan pendidikan tinggi daerah. Penelitian diawali dengan studi literatur komprehensif terhadap berbagai publikasi ilmiah dan dokumen kebijakan terkait implementasi MBKM di Indonesia guna membangun kerangka konseptual dan landasan teoritis penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pimpinan perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa, serta analisis dokumen institusi seperti kurikulum, laporan MBKM, dan dokumen kerja sama. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui proses pengkodean, kategorisasi, dan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola implementasi, hambatan kelembagaan, strategi adaptasi institusi, serta dampak implementasi MBKM terhadap pembelajaran dan keterlibatan mahasiswa di perguruan tinggi Kota Bima.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dialektika antara Antusiasme Kebijakan dan Keterbatasan Struktural dalam Implementasi MBKM

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di perguruan tinggi Kota Bima berlangsung dalam suatu ruang dialektika yang kompleks antara antusiasme normatif terhadap kebijakan nasional dan

keterbatasan struktural yang mengakar di tingkat lokal. Pada tataran konseptual, MBKM diproyeksikan sebagai instrumen transformasi pendidikan tinggi yang progresif, membuka ruang fleksibilitas kurikulum, memperluas jejaring pembelajaran lintas sektor, serta mengintegrasikan dunia akademik dengan kebutuhan riil masyarakat dan industri. Namun demikian, temuan empiris menunjukkan bahwa idealitas tersebut tidak serta-merta terwujud secara linier di lapangan, melainkan mengalami distorsi, negosiasi, dan bahkan reinterpretasi yang dipengaruhi oleh kondisi objektif institusi pendidikan tinggi di daerah perifer (Ulum et al., 2023).

Antusiasme pimpinan perguruan tinggi terhadap MBKM merupakan titik awal yang penting dalam memahami dinamika implementasi kebijakan ini. Para aktor kelembagaan melihat MBKM sebagai peluang strategis untuk keluar dari keterisolasian akademik dan meningkatkan daya saing institusi di tingkat nasional (Aswita, 2022). Dalam perspektif kebijakan publik, fenomena ini dapat dibaca sebagai bentuk *policy acceptance* yang tinggi pada tahap awal implementasi. Namun, antusiasme tersebut segera berhadapan dengan realitas keterbatasan sumber daya, khususnya dalam hal jejaring industri, infrastruktur digital, serta kapasitas kelembagaan yang belum memadai (Muh. Hasan Marwiji et al., 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *policy design* dan *implementation capacity*, di mana kebijakan yang dirancang secara seragam di tingkat pusat tidak sepenuhnya mempertimbangkan heterogenitas kapasitas antarwilayah.

Keterbatasan mitra eksternal menjadi salah satu hambatan paling krusial dalam implementasi MBKM di Kota Bima. Dalam konteks kebijakan yang menekankan pentingnya *link and match* antara pendidikan tinggi dan dunia industri, ketiadaan ekosistem industri yang kuat di daerah menyebabkan program magang dan kolaborasi eksternal sulit direalisasikan secara optimal. Perguruan tinggi dihadapkan pada dilema antara memenuhi standar nasional atau menyesuaikan program dengan realitas lokal yang terbatas. Akibatnya, banyak program MBKM yang mengalami pergeseran orientasi, dari yang semula berbasis industri menjadi berbasis komunitas atau sektor publik lokal. Transformasi ini bukan sekadar bentuk kompromi, tetapi juga refleksi dari kapasitas adaptif aktor lokal dalam menginterpretasikan kebijakan sesuai dengan konteks yang tersedia.

Dalam kerangka teori *street-level bureaucracy*, fenomena ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak pernah bersifat mekanis, melainkan selalu melibatkan diskresi aktor lapangan yang berperan sebagai interpreter kebijakan. Dosen dan pimpinan kampus tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai agen kreatif yang menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik yang relevan dengan kondisi lokal. Diskresi ini menghasilkan variasi implementasi yang signifikan, di mana MBKM tidak lagi tampil sebagai program yang homogen, tetapi sebagai spektrum praktik yang beragam, mulai dari program magang terbatas hingga proyek pemberdayaan masyarakat berbasis desa.

Namun demikian, adaptasi lokal tersebut tidak sepenuhnya mampu menutupi kesenjangan struktural yang ada. Keterbatasan kapasitas dosen menjadi persoalan fundamental yang mempengaruhi kualitas implementasi MBKM. Sebagai ujung tombak kebijakan, dosen dituntut untuk merancang kurikulum yang fleksibel, membimbing mahasiswa dalam kegiatan di luar kampus, serta memastikan capaian pembelajaran tetap terpenuhi. Akan tetapi, temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar dosen belum memiliki kesiapan yang memadai, baik dari segi kompetensi maupun pengalaman. Minimnya pelatihan, kurangnya insentif, serta beban administratif yang tinggi menyebabkan dosen sering kali harus belajar secara mandiri melalui proses *trial and error*.

Kondisi ini memperlihatkan adanya *mismatch* antara ekspektasi kebijakan dan kapasitas implementor. Dalam literatur implementasi kebijakan, fenomena ini sering disebut sebagai *implementation gap*, yaitu kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan kemampuan aktor pelaksana dalam mewujudkannya. Tanpa dukungan sistematis dalam bentuk pelatihan, pendampingan, dan insentif yang memadai, dosen cenderung mengalami kelelahan

institusional yang dapat berdampak pada menurunnya kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dosen menjadi prasyarat utama dalam memastikan keberhasilan MBKM, bukan hanya sebagai kebijakan formal, tetapi sebagai praktik pendidikan yang transformatif.

Selain itu, aspek infrastruktur digital juga menjadi faktor pembatas yang signifikan. Implementasi MBKM yang mengandalkan sistem daring dan kolaborasi lintas wilayah membutuhkan dukungan teknologi yang memadai. Namun, di banyak perguruan tinggi daerah, keterbatasan akses internet dan perangkat teknologi menjadi kendala yang tidak dapat diabaikan. Hal ini semakin mempertegas bahwa kebijakan pendidikan tinggi tidak dapat dilepaskan dari konteks pembangunan infrastruktur yang lebih luas.

Lebih jauh lagi, keterbatasan finansial mahasiswa menjadi dimensi penting yang memperkuat kompleksitas implementasi MBKM. Program-program yang menuntut mobilitas tinggi, seperti pertukaran pelajar atau magang di luar daerah, hanya dapat diakses oleh mahasiswa yang memiliki modal ekonomi yang cukup. Sementara itu, mahasiswa dari keluarga kurang mampu cenderung terpinggirkan dan hanya dapat mengikuti program-program lokal yang lebih terbatas. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan yang secara normatif bersifat inklusif justru dapat menghasilkan eksklusi baru ketika tidak disertai dengan mekanisme afirmasi yang memadai.

Dengan demikian, indikator pertama ini menegaskan bahwa implementasi MBKM di Kota Bima tidak dapat dipahami sebagai proses yang linear dan seragam, melainkan sebagai arena kontestasi antara visi normatif kebijakan dengan realitas struktural yang kompleks. Antusiasme aktor lokal merupakan modal penting, tetapi tanpa dukungan kapasitas yang memadai, kebijakan tersebut berpotensi menjadi simbol transformasi yang tidak sepenuhnya terwujud dalam praktik.

Ketimpangan Akses dan Formalisasi Evaluasi dalam Dinamika Implementasi MBKM

Indikator kedua dalam pembahasan ini berfokus pada dimensi ketimpangan akses dan problematika evaluasi yang muncul dalam implementasi MBKM, yang secara keseluruhan merefleksikan paradoks kebijakan pendidikan tinggi di daerah perifer. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun MBKM dirancang sebagai kebijakan yang inklusif dan demokratis, dalam praktiknya terdapat diferensiasi akses yang signifikan di antara mahasiswa, yang sebagian besar ditentukan oleh faktor sosial-ekonomi dan kapasitas digital.

Mahasiswa dengan latar belakang ekonomi yang kuat memiliki peluang lebih besar untuk mengakses program MBKM yang berskala nasional atau internasional. Mereka dapat mengikuti pertukaran pelajar, magang di perusahaan besar, atau program studi independen yang membutuhkan biaya tambahan. Sebaliknya, mahasiswa dari kelompok ekonomi lemah cenderung terjebak dalam program internal yang memiliki keterbatasan dalam hal pengalaman dan jejaring. Fenomena ini mengonfirmasi teori educational inequality, yang menyatakan bahwa distribusi sumber daya yang tidak merata akan menghasilkan ketimpangan dalam akses terhadap peluang pendidikan (Fuadi & Irdalisa, 2022).

Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada pengalaman belajar mahasiswa, tetapi juga berimplikasi pada reproduksi stratifikasi sosial dalam jangka panjang. Mahasiswa yang memiliki akses terhadap program MBKM yang lebih berkualitas akan memiliki keunggulan kompetitif di pasar kerja, sementara mereka yang terbatas pada program lokal akan menghadapi keterbatasan dalam mengembangkan keterampilan dan jaringan profesional. Dengan demikian, MBKM yang diharapkan menjadi instrumen mobilitas sosial justru berpotensi memperkuat ketimpangan yang sudah ada.

Di sisi lain, mekanisme evaluasi MBKM juga menunjukkan kelemahan yang signifikan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa evaluasi program masih didominasi oleh pendekatan administratif yang bersifat formalistik, di mana keberhasilan diukur berdasarkan kelengkapan laporan naratif, bukan pada capaian substantif mahasiswa. Praktik ini

mencerminkan adanya bias birokratis dalam sistem evaluasi, di mana aspek dokumentasi lebih diutamakan dibandingkan dengan kualitas pembelajaran.

Fenomena ini dapat dianalisis melalui perspektif akuntabilitas kebijakan, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara accountability dan performance. Dalam kasus MBKM, akuntabilitas administratif tampaknya lebih dominan dibandingkan dengan evaluasi kinerja substantif, sehingga menghasilkan apa yang disebut sebagai inflated success, yaitu kondisi di mana program terlihat berhasil secara administratif tetapi tidak memberikan dampak yang signifikan secara nyata (Arsyad & Widuhung, 2022).

Kelemahan evaluasi ini juga berkaitan dengan absennya indikator yang jelas dalam mengukur capaian pembelajaran mahasiswa. Tanpa instrumen evaluasi yang komprehensif, sulit untuk menilai sejauh mana MBKM berhasil dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem evaluasi yang tidak hanya berorientasi pada output, tetapi juga pada outcome dan impact.

Lebih jauh, adaptasi lokal yang dilakukan oleh perguruan tinggi di Kota Bima sebenarnya menunjukkan potensi inovasi yang signifikan. Program berbasis komunitas, proyek desa, dan kegiatan sosial yang dikembangkan oleh kampus-kampus lokal merupakan bentuk implementasi MBKM yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Namun, dalam kerangka evaluasi yang masih berorientasi pada standar nasional yang seragam, inovasi-inovasi ini sering kali tidak mendapatkan pengakuan yang memadai.

Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dalam menilai keberhasilan MBKM, dari yang semula berbasis pada keseragaman menjadi berbasis pada kontekstualitas. Pengakuan terhadap keberagaman bentuk implementasi akan memberikan ruang bagi perguruan tinggi di daerah untuk mengembangkan inovasi tanpa harus terjebak dalam standar yang tidak realistis.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa dinamika yang dikaji memperlihatkan relasi kausalitas yang kompleks antara struktur kelembagaan, kapasitas aktor, dan konteks sosial-ekonomi yang melingkupinya, sehingga menghasilkan konfigurasi kebijakan yang tidak selalu linier, melainkan adaptif dan kontingen. Temuan utama menunjukkan bahwa efektivitas intervensi sangat ditentukan oleh kemampuan integratif antar sektor, konsistensi implementasi, serta keberlanjutan mekanisme evaluasi berbasis data. Selain itu, terdapat indikasi kuat bahwa kesenjangan struktural dan asimetri informasi masih menjadi variabel penghambat yang signifikan. Secara teoretis, studi ini berkontribusi dalam memperkaya diskursus mengenai pendekatan sistemik dan interdisipliner dalam analisis kebijakan publik. Ke depan, diperlukan eksplorasi lebih lanjut yang menitikberatkan pada inovasi model kolaboratif dan penguatan kapasitas institusional guna memastikan keberlanjutan dan skalabilitas dampak kebijakan secara lebih komprehensif.

5. REFERENSI

- Al Anshori, F., & Syam, S. (2021). Persepsi Mahasiswa Pendidikan Biologi Terhadap Merdeka Belajar Kampus Merdeka. *Jurnal Biogenerasi*, 6(2), 147–153. <https://doi.org/10.30605/biogenerasi.v6i2.1387>
- Arisandi, D., Widya Mutiara, M., & Christanti Mawardi, V. (2022). Dampak Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Mbkm) Magang Dan Studi Independen Dalam Meningkatkan Kompetensi Mahasiswa. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 6(1), 174–181. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v6i1.16163.2022>
- Arsyad, A. T., & Widuhung, S. D. (2022). Dampak Merdeka Belajar Kampus Merdeka Terhadap Kualitas Mahasiswa. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 3(2), 88.

- <https://doi.org/10.36722/jaiss.v3i2.1027>
- Aswita, D. (2022). Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Mbkm): Inventarisasi Mitra Dalam Pelaksanaan Magang Mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. *Prosiding Seminar Nasional Biotik*, 9(2), 56. <https://doi.org/10.22373/pbio.v9i2.11747>
- Baharuddin, M. R. (2021). Adaptasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Fokus: Model MBKM Program Studi). *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 4(1), 195–205. <https://doi.org/10.30605/jsgp.4.1.2021.591>
- Dermawan, D. (2011). 458-Article Text-2952-2-10-20211106.
- Dewi, U., Sumarno, A., & Susarno, L. H. (2022). PEMBELAJARAN DARING UNTUK Mendukung Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Online Learning to Support The Implementation of Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(01), 1–14.
- Fachri, B., Rizal, C., & Supiyandi. (2024). Penerapan Metode Waterfall Dalam Perancangan Sistem Informasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Berbasis Web. *Jurnal Komputer Teknologi Informasi Dan Sistem Informasi (JUKTISI)*, 2(3), 591–597. <https://doi.org/10.62712/juktisi.v2i3.147>
- Fuadi, T. M. (2022). The concept of Independent Learning-Independent Campus (MBKM): Application in Biology Education. *Prosiding Seminar Nasional Biotik*, 9(2), 38.
- Fuadi, T. M., & Irdalisa, I. (2022). Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Application in Education Faculty. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 13(3), 2747–2756. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v13i3.1125>
- Jufriadi, A., Huda, C., Aji, S. D., Pratiwi, H. Y., & Ayu, H. D. (2022). Analisis Keterampilan Abad 21 Melalui Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 7(1), 39–53. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v7i1.2482>
- Krishnapatria, K. (2021). MBKM Curriculum in English Studies Program: Challenges and Opportunities. *ELT in Focus*, 4(1), 15–38. <https://doi.org/10.35706/eltinf.v4i1.5276>
- Mailin, M. (2021). Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi. *Jurnal Analisa Pemikiran Insaan Cendikia*, 4(1), 68–75. <https://doi.org/10.54583/apic.vol4.no1.59>
- Mariati, M. (2021). Tantangan Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi. 747–758. <https://doi.org/10.53695/SINTESA.V1I1.405>
- Mudrikah, A., Khorri, A., Hamdani, H., Holik, A., Hakim, L. L., Yasmadi, B., & Hidayat, H. (2022). Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Islam Nusantara. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(01), 137. <https://doi.org/10.30868/im.v5i01.2177>
- Muh. Hasan Marwiji, Bambang Qomaruazzaman, & Qiqi Yulianti Zaqiah. (2023). Inovasi Dalam Bidang Kurikulum: Merdeka Belajar, Kampus Merdeka dan Penerapannya. *Jurnal Educatio*, 9(4), 1–10. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i3.6283>
- Mutmainah, I., Yulia, I. A., Marnilin, F., & Mahfudi, A. Z. (2022). GAP Analysis Untuk Mengetahui Kinerja Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 10(1), 19–34. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v10i1.934>
- Purwanti, E. (2021). *Preparing the Implementation of Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Policy in Higher Education Institutions*. 518(ICoSIHESS 2020), 384–391. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210120.149>
- Rodiyah, R. (2021). Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Era Digital dalam Menciptakan Karakter Mahasiswa Hukum yang Berkarakter dan Profesional. *Jurnal Nasional Hukum*, 7(2), 425–434.
- Santri Fahmi, S. F. S. F. (2022). Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. *At-Tadris: Journal of Islamic Education*, 2(1), 92–97. <https://doi.org/10.56672/attadris.v2i1.70>
- Simatupang, E., & Yuhertiana, I. (2021). Merdeka Belajar Kampus Merdeka terhadap Perubahan Paradigma Pembelajaran pada Pendidikan Tinggi: Sebuah Tinjauan Literatur.

- Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Ekonomi*, 2(2), 30–38.
<https://doi.org/10.47747/jbme.v2i2.230>
- Suandi, M. (2018). Belajar dan Pembelajaran. *Deepublish Publisher*, 9(1), 210–220.
- Suteja, J. (2020). Kampus Merdeka : Merdeka Belajar. *Pasundan, Universitas, June*, 13–16.
- Ulum, B., Fatimah, E., Hayati, N., Margio Reta, E., & Rosyid, A. (2023). Konsep Dan Penerapan Kurikulum Mbkm (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). *Jurnal Citra Pendidikan*, 3(1), 671–675. <https://doi.org/10.38048/jcp.v3i1.1456>
- Widawati, W., & Anwar, M. (2023). *Perancangan Basis Data Mitra Kerjasama UNP Guna Optimalisasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka E LEKTIF: Jurnal Elektronika & Informatika Konsep Kerjasama atau Kolaborasi*. 1(1), 1–10.
- Yanuarsari, R., Iwan Asmadi, Muchtar, H. S., & Rita Sulastini. (2022). Peran Program Merdeka Belajar Kampus. *Jurnal Comm-Edu*, 5(2), 52–62.